ANALISIS PENGELOLAAN BIAYA PENDIDIKAN

Tiara Aulia Mufidha *¹

Ratna Kholifatul ²

Divanny Aulia Hanif ³

Ahmad Arum Jalaludin ⁴

Lady Maysuri Ma'rufi ⁵

Bahtiyar Heru Susanto ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas PGRI Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

*e-mail : tiaraaulia2727@gmail.com ¹, ratnakholidatul17@gmail.com ², divannyaulia@gmail.com ³,
ahmadarum1234@gmail.com ⁴, ladykaisurimarufi@gmail.com ⁵, bahtiyar@upy.ac.id ⁶

Abstrak

Perekonomian Indonesia rentan terhadap krisis multi dimensi yang terus menghantui negara kita. Sejauh ini, tampaknya belum ada tanda-tanda negara kita akan selamat dari krisis ini. Hal ini berdampak pada kehidupan masyarakat, terutama mereka yang tidak mampu. Beban hidup sangat berat terutama bagi kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi. Hal ini terlihat dari segala macam kebutuhan hidup yang semakin tidak terjangkau. Misalnya, pendidikan merupakan salah satu dari permasalahan negara yang belum ditemukan solusi yang tepat. Jika kita mencermati dan menelusuri perkembangan pendidikan, terutama dari segi historis biaya pendidikan, kita menemukan bahwa biayanya semakin mahal.

Selain itu, kondisi kehidupan masyarakat kurang beruntung di kalangan masyarakat miskin semakin hari semakin tidak aman. Hal ini terutama berlaku bagi masyarakat yang tidak dapat memperoleh pendapatan tetap karena PHK atau alasan lainnya. Mahalnya biaya pendidikan tidak hanya berlaku di sekolah dan universitas negeri dan swasta. Misalnya, pada tingkat pendidikan dasar, pemerintah memberikan dana bantuan operasional sekolah (BOS) kepada sekolah dasar dan menengah negeri, yang jumlahnya tidak mencukupi untuk menutupi biaya pendidikan sebagian besar masyarakat kelas menengah ke bawah. Khususnya biaya operasional pokok ditanggung oleh orang tua siswa.

Kata Kunci : Pengelolaan, Biaya Pendidikan

Abstract

The Indonesian economy is vulnerable to the multi-dimensional crisis that continues to haunt our country. So far, there seems to be no sign that our country will survive this crisis. This has an impact on people's lives, especially those who cannot afford it. The burden of life is very heavy, especially for economically disadvantaged groups of people. This can be seen from all kinds of living necessities which are increasingly unaffordable. For example, education is one of the country's problems for which no appropriate solution has been found. If we look closely and trace the development of education, especially from the historical perspective of education costs, we find that the costs are increasingly expensive.

In addition, the living conditions of disadvantaged people among the poor are becoming increasingly unsafe. This is especially true for people who cannot earn a steady income due to layoffs or other reasons. The high cost of education does not only apply to state and private schools and universities. For example, at the basic education level, the government provides school operational assistance (BOS) funds to state primary and secondary schools, the amount of which is insufficient to cover the educational costs of the majority of the lower middle class. In particular, basic operational costs are borne by the students' parents.

Keywords : Management, Education Costs

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Namun karena mahalnnya biaya, tidak semua orang mempunyai akses terhadap pendidikan yang layak dan memadai. Berdasarkan keadaan tersebut, maka ditetapkanlah UUD 1945 yang memuat peraturan-peraturan tentang pendidikan. Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam melahirkan generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu memajukan Indonesia yang lebih maju. Pendidikan harus menjadi hak seluruh warga negara Indonesia, sebagaimana pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan bangsa adalah

“mencerdaskan bangsa”. Artinya negara harus menata seluruh masyarakat Indonesia dan menjamin mereka mendapat pendidikan yang sesuai dengan kehidupannya.

Manajemen pendidikan sangat penting untuk pengembangan sumber daya manusia, dimulai dengan pendidikan dari usia 7 sampai 12, 20, dan 30 tahun, dan meluas hingga pendidikan seumur hidup. Pembangunan pendidikan merupakan sumber energi, sehingga visi yang tajam dari para penyelenggara dan pengambil kebijakan pendidikan merupakan prasyarat penting untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan memastikan bahwa masyarakat memperoleh keterampilan yang berkualitas. Penting bagi administrator pendidikan untuk memahami bagaimana biaya terkait guru ditentukan dan dipilih, jangka waktu untuk menentukan biaya pendidikan, dan perkiraan keuangan yang diperlukan.

Mengingat pentingnya peran keuangan dan keuangan dalam proses pembelajaran, maka pengelolaan keuangan yang baik sangat penting dalam terselenggaranya pendidikan. Selanjutnya tata kelola keuangan ini disebut dengan pengelolaan keuangan/keuangan. Banyak sekolah yang tidak mampu melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara maksimal hanya karena kendala finansial dalam membayar guru dan menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam hal ini yang dituntut reformasi adalah pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas selalu membutuhkan biaya yang besar. Standar pendanaan merupakan salah satu standar nasional pendidikan yang mempengaruhi pencapaian tujuan pendidikan nasional. Uraian mengenai standar pendanaan pendidikan dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP RI SNP). “Bab IX Pasal 62 PP menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat daerah harus tersedia. Agar pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik, negara bagian, pemerintah negara bagian, dan masyarakat harus memahami dan memenuhi kewajiban dan tanggung jawab mereka terkait pendanaan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Apa Pengertian Pengelolaan Biaya Pendidikan

Keuangan dan pendanaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, pendanaan dan pendanaan merupakan kemungkinan yang sangat penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penelitian manajemen pendidikan.

Pengertian Biaya menurut Supriyono Biaya adalah pengorbanan ekonomi yang dilakukan untuk memperoleh suatu barang atau jasa. Secara bahasa, biaya dapat diartikan sebagai pengeluaran. Secara ekonomi, pengeluaran dapat diartikan sebagai Uang atau bentuk uang lainnya. (Dedi Supriadi, 2004) dalam bukunya mengartikan biaya sebagai segala jenis pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk uang, barang, dan tenaga (yang dapat dihargai dengan uang).

Menurut Hasbullah, pembiayaan sekolah adalah kegiatan peningkatan biaya dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja pendidikan. Biaya dalam pengertian ini adalah suatu jenis pengeluaran yang berupa barang atau tenaga untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan. Mendanai pendidikan pada hakikatnya adalah mendistribusikan manfaat pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Unsur biaya merupakan faktor penentu dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap derajat efisiensi dan efektivitas suatu organisasi/kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut (Domai, 2010), pendanaan pendidikan tidak lepas dari tema “ekonomi pendidikan”. Faktanya, Mark Breaux pernah mengatakan bahwa “ekonomi pendidikan adalah salah satu cabang ilmu ekonomi. Menurut pandangan ini, pembiayaan pendidikan pada hakikatnya merupakan bagian atau cabang ilmu ekonomi. Sebab, menurut Blau, pembiayaan pendidikan adalah mengenai biaya dan pembiayaan sekolah, yang merupakan bagian dari

masalah ekonomi pendidikan. Pada bagian lain, Mark Brough mengatakan, "Ekonomi pendidikan hanyalah salah satu bagian dari masalah pendidikan." "Dari sudut pandang ini, kajian ekonomi pendidikan dan keuangan pendidikan hanyalah salah satu isu penting dalam dunia pendidikan.

Menurut Bapak Yahyadan (2012) dari Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia yang dikutip oleh Bapak Mulyono, pembiayaan mengacu pada cara mencari dana atau sumber dana, rencana biaya standar, peningkatan modal kerja, masa depan. tentang bagaimana Anda menggunakan dana ini menggunakan rencana Anda.

Sedangkan (Fattah, 2000) membagi biaya pendidikan menjadi gaji guru, peningkatan peralatan profesi, pengadaan alat dan buku pelajaran, perlengkapan kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan dan supervisi pendidikan.

Biaya merupakan faktor penentu dalam mekanisme penganggaran. Keputusan biaya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan tertentu. Kegiatan yang menghasilkan hasil berkualitas tinggi dengan biaya rendah dianggap dilaksanakan secara efisien dan efektif.

B. Perencanaan Biaya Pendidikan

1. Pengertian Perencanaan

Pengertian perencanaan mempunyai beberapa rumusan yang berbeda satu dengan lainnya. Menurut Cuningham sebagaimana dikutip Made Pidarta (2005:1), perencanaan adalah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batasbatas yang dapat diterima dan digunakan dalam penyelesaian. Perencanaan dalam pengertian ini menitikberatkan kepada usaha untuk menyeleksi dan menghubungkan sesuatu dengan kepentingan masa yang akan datang serta usaha untuk mencapainya. (Sahnan, 2017:144).

Perencanaan yang dalam ilmu manajemen disebut planning, adalah persiapan menyusun suatu keputusan berupa langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tertentu. Secara sederhana perencanaan adalah pemikiran sebelum pelaksanaan tugas. (Margareth, 2017:340)

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang paling mungkin untuk dilaksanakan. Melalui perencanaan dapat dijelaskan tujuan yang akan dicapai, ruang lingkup pekerjaan yang akan dijalankan, orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan itu, berbagai sumber daya yang diperlukan, serta langkah-langkah dan metode kerja yang dipilih berdasarkan urgensi dan prioritasnya. Semua itu menjadi arah dan panduan dalam mengorganisir unsur manusia dalam pendidikan, pengerahan, dan pemanfaatan berbagai sumber daya guna menunjang proses pencapaian tujuan dan dapat dijadikan sebagai alat pengendalian tentang pencapaian tujuan. (Fiki, 2018:16)

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa perencanaan merupakan penetapan suatu cara untuk bertindak sebelum tindakan itu dilaksanakan atau bisa dikatakan suatu program yang harus dirancang sebelum program tersebut dijalankan. Perencanaan adalah dimana setiap orang harus terlebih dahulu berfikir tentang apa yang akan dilaksanakannya serta bertanggung jawab terhadap kegiatan yang akan dilakukan, sehingga diharapkan tujuan yang telah dirancang itu bisa tercapai secara efektif dan efisien.

2. Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan diartikan sebagai jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup: gaji guru, peningkatan kemampuan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar perbaikan ruang belajar, pengadaan perabot/mebeler, pengadaan alat tulis kantor, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi/pembinaan pendidikan serta ketatausahaan sekolah yang semuanya diselenggarakan dalam RAPBS selama setahun. Berdasarkan pengeluaran biaya operasional pendidikan, selanjutnya dapat dihitung rata-rata biaya pendidikan. (Fiki, 2018:17)

Biaya pendidikan juga dapat diartikan sebagai segala pengeluaran yang digunakan untuk memperlancar kegiatan pendidikan baik berupa uang maupun bukan uang, pembiayaan

pendidikan menjadi unsur penting dalam memperlancar proses kegiatan pendidikan, sehingga dalam penggunaannya perlu dipertimbangkan efisiensi dan efektifitasnya, hal ini dikarenakan pembiayaan pendidikan mengacu pada standar peraturan dalam penggunaannya, berdasarkan pengaturan standarisasi tersebut, pembiayaan pendidikan harus mempertimbangkan efisiensi dari pembiayaan yang digunakan, dengan demikian pembiayaan pendidikan dapat bermanfaat guna memajukan pendidikan, serta mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. (Atmaja et al., 2016:2)

Biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak (masyarakat, orang tua, dan pemerintah) terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan tercapai secara efisien dan efektif, yang harus digali dari berbagai sumber, dipelihara, dikonsolidasikan, dan ditata secara administrative. Pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses mengalokasikan sumber pada kegiatan atau program pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam proses belajar mengajar di sekolah. (Atmaja et al., 2016:120)

Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa biaya pendidikan adalah aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima dan bagaimana penggunaan dana tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah ditetapkan.

3. Jenis biaya pendidikan

Pertama, biaya langsung (direct cost) diartikan sebagai pengeluaran uang yang secara langsung membiayai penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Anwar dan Idochi, 1991). Biaya langsung juga diartikan sebagai biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan. Sebagai contoh biaya untuk gaji guru dan pengadaan fasilitas belajar-mengajar (Gaffar, 1991). Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, dan gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah, orang tua, maupun peserta didik sendiri.

Kedua, biaya tidak langsung (indirect cost) dapat dimaknai sebagai biaya yang umumnya meliputi hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti pendidikan (earning foregone by students), bebasnya beban pajak karena sifat sekolah yang tidak mencari laba (cost of tax exemption), bebasnya sewa perangkat sekolah yang tidak dipakai secara langsung dalam proses pendidikan serta penyusutan sebagai cermin pemakaian perangkat sekolah yang sudah lama dipergunakan (implicit rent and depreciation). (W. P, 2013:570)

Jenis-jenis biaya pendidikan dapat dibagi ke dalam dua jenis dengan istilah yang berbeda yaitu: biaya investasi dan biaya operasi.

- Biaya investasi adalah biaya penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya lebih permanen dan dapat dimanfaatkan jangka waktu relatif lama, lebih dari satu tahun. Biaya investasi terdiri dari biaya investasi lahan dan biaya investasi selain lahan. Biaya investasi menghasilkan aset dalam bentuk fisik dan non fisik, berupa kapasitas atau kompetensi sumber daya manusia. Dengan demikian kegiatan pengembangan profesi guru termasuk ke dalam investasi yang perlu mendapat dukungan dana yang memadai.

- Biaya operasi adalah biaya yang diperlukan sekolah untuk menunjang proses pendidikan. Biaya operasi terdiri dari biaya personalia dan biaya non personalia. Biaya personalia mencakup: gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan tunjangan-tunjangan lain yang melekat dalam jabatannya. Biaya non personalia, antara lain biaya untuk: Alat Tulis Sekolah (ATS), bahan dan alat habis pakai, yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang, pemeliharaan dan perbaikan ringan, daya dan jasa transportasi/perjalanan dinas, konsumsi, asuransi, pembinaan siswa/ekstra kurikuler. (Fiki, 2018:18-19).

C. Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Pendidikan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan

sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Setelah perencanaan pembiayaan pendidikan selesai dan disetujui oleh semua komponen yang terlibat, dan menghasilkan sebuah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), tahapan manajemen selanjutnya yaitu pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Kegiatan pelaksanaan pembiayaan madrasah meliputi dua kegiatan besar yakni penerimaan dan pengeluaran keuangan madrasah/sekolah. Kegiatan kedua dari manajemen pembiayaan adalah pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. Hal-hal yang perlu dibukukan dalam keuangan sekolah adalah menyangkut penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. Kegiatan yang dilakukan berupa Penerimaan Biaya Pendidikan dan Pengeluaran Biaya Pendidikan. (RISKI, 2018:6-7)

D. Evaluasi Pengelolaan Biaya Pendidikan

Evaluasi pendidikan juga diartikan dengan proses untuk memberikan kualitas yaitu nilai dari kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan, yang mana proses tersebut berlangsung secara sistematis, berkelanjutan, terencana, dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Proses melakukan evaluasi mungkin saja berbeda sesuai persepsi teori yang dianut, ada bermacam-macam cara. Namun evaluasi harus memasukkan ketentuan dan tindakan sejalan dengan fungsi evaluasi, yaitu:

- 1) Memfokuskan evaluasi
- 2) Mendesain evaluasi
- 3) Mengumpulkan informasi
- 4) Menganalisis informasi
- 5) Melaporkan hasil evaluasi
- 6) Mengelola evaluasi dan mengevaluasi evaluasi.

Evaluasi pembiayaan pendidikan merupakan alat untuk mengukur dari melihat hasil rencana yang dicanangkan pada planning.

Memberikan imbalan kepada staff sesuai kinerja yang ditunjukkan, dan merancang serta merencanakan kembali sambil memperbaiki hal-hal yang belum sempurna. Evaluasi pada administrasi berarti kegiatan mengukur tingkat efektivitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode dan alat bantu tertentu dalam usaha mencapai tujuan. Mengamati tingkat efektivitas maksudnya menilai tindakan tindakan atau kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, apakah telah menghasilkan sesuatu seperti direncanakan atau sekurang-kurangnya, apakah kegiatan itu telah berjalan di atas rel yang sebenarnya dan tidak menyimpang dari perencanaan atau tujuan yang telah ditetapkan.

Sedang mengamati tingkat efisiensi maksudnya menilai tindakan tindakan/ kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan itu apakah merupakan cara yang terbaik atau paling tidak untuk mencapai hasil yang sebesar besarnya dengan resiko yang sekecil-kecilnya, yang berarti apakah cara kerja tertentu yang sudah dipergunakan mampu memberi hasil yang maksimal.

Evaluasi atau yang sering disebut evaluation involves auditing, merupakan pertanggungjawaban terhadap keuangan sekolah menyangkut seluruh pengeluaran dana sekolah yang berkaitan dengan apa yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam implementasi manajemen berbasis sekolah setiap akhir tahun anggaran sekolah dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap dana yang dikeluarkan selama tahun anggaran. Pertanggungjawaban ini dilakukan di dalam rapat dewan sekolah, yang diikuti komponen sekolah, komponen masyarakat dan pemerintah daerah.

Matin (2014: 55-56) menyatakan bahwa untuk dapat menyusun anggaran pendidikan yang tepat, pada administrator dan manajer pendidikan harus memahami dan menguasai sistem penganggaran yang berlaku di suatu negara, terdapat enam sistem penganggaran pendidikan yang dikenal dan dianut oleh suatu negara yaitu: Line Item Budgeting (LIB), Capital Budgeting

(CAB)Performance Budgeting (PEB), Program Budgeting (PROB), Planning Programming and Budgeting System (PPBS) dan Zero Base Budgeting (ZBB).

Evaluasi Pelaksanaan anggaran memperlihatkan kategori hasil/kriteria pelaksanaan yang Efektif/ Baik, dimana berdasarkan hakikatnya pelaksanaan anggaran adalah kegiatan penyesuaian anggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan, baik berupa peraturan perundang- undangan anggaran rutin maupun anggaran pembangunan. Dalam pelaksanaan anggaran diperlukan penentuan besar anggaran dan analisa biaya pendidikan di masing-masing sekolah.

Pada evaluasi pelaksanaan penatausahaan keuangan dalam kategori hasil/kriteria pelaksanaan. Efektif/Baik, menunjukkan pelaksanaan kegiatan penatausahaan ini adalah kewajiban pendataan pelaporan transaksi keuangan dalam bidang pendidikan harus tercatat sesuai kronologis secara sistematis berdasar periode tertentu yang telah ditetapkan, dimana tiap catatan harus dilengkapi dengan dokumen keuangan. Dan pembukuan pelaksanaan anggaran pendidikan pembukuan, dimana dilakukan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi-transaksi keuangan sebagai teknis akuntansi, yang tidak hanya melakukan pembukuan, tetapi juga melakukan pemeriksaan laporan, penyusunan keuangan, penafsiran laporan keuangan, dan lain sebagainya.

Evaluasi Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam kategori hasil/kriteria pelaksanaan Efektif/Baik, dimana salah satu aktivitasnya adalah pembuatan laporan keuangan dari pengelolaan anggaran keuangan bidang pendidikan yang tersusun rapi setelah semua bukti pengeluaran diuji keabsahan dan kebenarannya berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, untuk disampaikan ke instansi terkait. Variabel ini menyangkut dengan pencairan dana selanjutnya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, jika laporan pertanggung-jawaban terlambat dilaporkan maka pencairan dana BOS Reguler maupun BOSDA selanjutnya pun akan terlambat.

Evaluasi Pelaksanaan pengawasan anggaran memperlihatkan kategori hasil/kriteria pelaksanaan Efektif/Baik, yang terdiri dari evaluasi penggunaan anggaran pendidikan, dan pelaporan penggunaan anggaran pendidikan. Evaluasi penggunaan anggaran pendidikan adalah aktivitas melakukan pengukuran untuk menilai perkembangan atau tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana dan program berdasarkan kriteria tertentu. Pelaporan penggunaan anggaran pendidikan adalah bagian dari sistem pengawasan yang berkenaan dengan hasil-hasil pelaksanaan rencana dan program pendidikan, masalah dan hambatan yang dihadapi, dan alternatif-alternatif yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

E. Contoh Permasalahan Dan Solusi Terkait Pengelolaan Biaya Pendidikan

Peraturan pemerintah dan sistem perundangan setidaknya sudah memberikan ruang yang cukup luas bagi orang tua murid terutama komite sekolah untuk turut serta dalam mengawasi penggunaan dana Bos. Permasalahannya kemudian, apakah orang tua murid memiliki cukup nyali dan kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap pihak sekolah. Hal tersebut dikarenakan orang tua murid seringkali berada di dalam posisi lemah ketika dihadapkan dengan pihak sekolah (Jack, 2015:88-89).

Sebuah kisah yang ditemukan dalam kajian ini menarik untuk dijadikan contoh kasus. Salah seorang ibu sebut saja ibu AM yang berprofesi sebagai IRT yang kegiatannya menjajakan makanan basah pada beberapa warung kopi setiap paginya sikap AM yang mengkritik salah satu pungutan yang dilakukan sekolah. Menurutnya, pungutan yang dilakukan tersebut tidak jelas rinciannya. Karena bingung akan mengadu ke mana, maka dia melaporkannya ke salah satu media massa. Sebagaimana media massa informasi ini merupakan hal penting untuk di ekspos dan selanjutnya ditelusuri akhirnya berita ini meluas dan salah satu dinas pendidikan menindak lanjuti memberikan surat pernyataan kepala sekolah tersebut.

Bukannya kepala sekolah terbuka untuk menjelaskan, tetapi malah sebaliknya, kepala sekolah mengumpulkan semua orang tua atau wali untuk dimarahi. Tak terhenti di situ pihak sekolah berusaha mencari tahu siapa yang mengadu. Akibatkan anak dari yang terduga mengadu malahan dideskreditkan di ruang kelas oleh para guru dan kepala sekolah.

Contoh kasus ini akhirnya menarik untuk digarisbawahi, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah atau orang tua murid tidak hanya membutuhkan ruang dan dukungan kebijakan semata. Tetapi terlebih lagi membutuhkan kapasitas serta keberanian orang tua murid untuk melakukannya. Berbagai upaya untuk melakukan pengawasan haruslah didasarkan strategi yang cerdas dan sinergi agar dapat mencapai tujuan utamanya, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di sekolah. Kedua aspek tersebut tak lain ditunjukkan demi pemenuhan hak dasar warga negara terutamanya di bidang pendidikan.

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pendidikan mempunyai biaya sebesar. Pendidikan adalah investasi, jadi Anda harus mengeluarkan biaya lebih untuk pendidikan Anda. Modal manusia, berupa keterampilan dan kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan, belajar mandiri, atau belajar paruh waktu, memerlukan biaya yang ditanggung oleh individu. Memperoleh keterampilan dan kemampuan membawa manfaat yang sangat tinggi bagi pendapatan seseorang. Pendidikan adalah tanggung jawab bangsa dan masyarakat, dan keuangan juga menjadi tanggung jawab kita semua. Peran masyarakat dalam menunjang biaya pendidikan, termasuk tabungan untuk membantu pendanaan pendidikan, sangatlah penting.

Belanja pendidikan adalah bentuk pendidikan finansial dan non finansial sebagai wujud tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan (masyarakat, orang tua, pemerintah) terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang dimaksud dapat tercapai secara efektif. Dalam semua kasus, informasi dari berbagai sumber diteliti, dipelihara, diintegrasikan, diatur secara administratif, dan dilaksanakan secara efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, T. E., Harun, C. Z., & Ibrahim, S. (2016). Analisis Penetapan Standar Biaya Pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 4(1), 119-128. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/8167/8148>
- Fiki, R. L. (2018). *Perencanaan Biaya Pendidikan Di Smam 6 Karangasem Paciran Lamongan*. [http://etheses.iainponorogo.ac.id/5504/1/up to down.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/5504/1/up%20to%20down.pdf)
- Handayani, N. F., & Huda, N. (2020). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Sma Negeri Pascadesentralisasi Pendidikan. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 3(4), 332-341.
- Hasibuan, Lias, Kasful Anwar Us, and Hamdi Zas Pendi. "Pengelolaan Biaya Pendidikan: Kajian Studi Pustaka." *Jurnal Literasiologi* 5.2 (2021).
- Jack, H. (2015). Optimalisasi Anggaran Pendapatan Dan Biaya Sekolah: Kajian Di Sekolah Kota Banda Aceh. *Jurnal Pencerahan*, 9(2), 83-93. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JPP/article/view/2878>
- Lailatul Mufidah, K. T. (2021). No Pengelolaan Biaya Pendidikan: Kajian Studi Pustaka. 7(3), 6.
- Maharani, I., & Afriansyah, H. (2019). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan.
- Margareth, H. (2017). Perencanaan Biaya Pendidikan. *Экономика Региона*, 32.
- RISKI, A. (2018). PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA. Universitas Negeri Padang, 1-8.
- Riski, Aulia. "Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia." (2019).
- Sahnan, M. (2017). Urgensi Perencanaan Pendidikan Di Sekolah Dasar. *Jurnal PPkn Dan Hukum*, 12(2), 142-159. <https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/view/4696>
- W. P, F. (2013). Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19(4), 565-578. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v19i4.310>